

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Provinsi Jawa Timur pada Triwulan II 2021 mencapai 1,19 % (y on y), lebih rendah dibandingkan Triwulan II 2020 yang sebesar 2,04 % (y on y), serta lebih rendah dari capaian Triwulan I 2021 yang sebesar 1,29 % (y on y). Demikian juga, capaian inflasi Jawa Timur triwulan II 2021 tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional 1,33 % (y on y). Jika dilihat lebih detail, dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yang diukur maka sumbangan inflasi dipengaruhi oleh tekanan pada 8 (delapan) kelompok pengeluaran yaitu; (1) kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,52 %, (2) kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,34 %, (3) kelompok kesehatan sebesar 0,29 %, (4) kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 %, (5) kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,16 %, (6) kelompok pendidikan sebesar 0,11 %, (7) kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,05 %, serta (8) kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 %. Sedangkan deflasi terjadi pada 3 (tiga) kelompok, antara lain; (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,84 %, (2) diikuti kelompok transportasi sebesar 0,47 % dan (3) kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06 %.

Inflasi Jawa Timur pada Triwulan II 2021 awalnya diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan I 2021 karena event rutin tahunan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa Ramadhan dan Idul Fitri 1422 H. Namun ternyata realisasinya tingkat inflasi Jawa Timur mengalami perlambatan. Hal tersebut diakibatkan oleh turunnya permintaan masyarakat dan konsumsi rumah tangga pada HBKN sejalan dengan penerapan kebijakan mengenai pengendalian mobilitas masyarakat guna menekan laju penularan pandemi Covid-19 berdasarkan Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 perihal Larangan Mudik Berlaku 6-17 Mei 2021. Dari data yang dirilis BPS terlihat bahwa pada saat HBKN bulan Mei 2021 terdapat 6 (enam) kelompok memberikan andil/ sumbangan inflasi dan 5 (lima) kelompok lainnya memberikan andil yang sangat kecil. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/ sumbangan inflasi terbesar ada 3 (tiga), antara lain; (1) kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yaitu sebesar 0,08 %, (2) kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,07 %, (3) kelompok transportasi sebesar 0,05 %.

Inflasi Jawa Timur pada Triwulan III 2021 diperkirakan akan terus mengalami penurunan dibandingkan Triwulan II 2021 yang disebabkan oleh penerapan kebijakan PPKM Darurat dalam rangka menekan laju penyebaran pandemi Covid-19 melalui Instruksi Mendagri PPKM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Instruksi yang menjadi dasar hukum pemberlakuan PPKM Darurat yang berlaku mulai tanggal 3 Juli s.d 20 Juli 2021, jika dilakukan perpanjangan masa PPKM Darurat sampai bulan Agustus maka akan sangat berdampak pada turunnya permintaan konsumsi masyarakat secara luas. Dengan wacana dan isu penting tersebut, maka TPID Provinsi Jatim perlu mewaspadaai menurunnya sisi permintaan (sisi demand) masyarakat terutama terhadap barang konsumtif, padahal pada sisi produksi (sisi supply) relatif lebih terjaga. Hal tersebut akan berpotensi terjadi over-supply atau over-stock karena pembatasan mobilitas masyarakat yang lebih ketat. Fenomena tersebut berpotensi terjadinya deflasi akibat penurunan permintaan masyarakat karena melemahnya daya beli yang kehilangan pendapatan dari pekerjaan di masa pandemi Covid-19 meskipun ada bantuan program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Bagi masyarakat yang tidak terdampak pandemi secara ekonomi dan memiliki keuangan yang memadai akan menunda konsumsi karena restriksi aturan di masa pandemi yaitu stay at home dan work from home. Salah satu ancaman deflasi bagi Jawa Timur, khususnya pada komoditas strategis, akan sangat mempengaruhi motivasi petani dan UMKM Jawa Timur yang tetap memproduksi di tengah

pandemi Covid-19. Sedangkan di lain sisi, tekanan dari sisi supply komoditas strategis (volatile food) saat ini juga disebabkan oleh pengaruh curah hujan tinggi (cuaca kemarau basah)/ pergeseran musim tanam/ sehingga ada potensi gagal panen. LA NINA yang terjadi di wilayah Jawa Timur meningkatkan curah hujan hingga 40 % hingga akhir musim kemarau (bulan Mei s.d September). Inflasi inti (core), diperkirakan mengalami penurunan yang utamanya didorong oleh deflasi komoditas kendaraan bermotor (mobil) seiring dengan pemberian insentif penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor tertentu dan deflasi komoditas emas perhiasan yang berlanjut seiring perlambatan inflasi emas global. Lebih lanjut, inflasi inti yang rendah tidak terlepas dari pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, stabilitas nilai tukar dan harga komoditas global yang terjaga, serta konsistensi berbagai bauran kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam mengarahkan pembentukan ekspektasi inflasi di masyarakat. Sedangkan kelompok inflasi dari harga yang diatur pemerintah (administered price) pada Triwulan mendatang akan diprediksi cenderung menurun dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan tarif berbagai angkutan pasca-penerapan PPKM Darurat, khususnya angkutan udara, angkutan laut, angkutan darat (angkutan antarkota, dan kereta api).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan data Berita Rilis Statistik (BRS) Inflasi oleh BPS kelompok pengeluaran yang menyumbang inflasi terbesar pada tahun kalender Triwulan II 2021 antara lain pada (1) kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 2,24% (y to d), (2) kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 1,94% (y to d), dan (3) kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,48% (y to d). Jika dilihat secara bulanan komoditas penyumbang inflasi tertinggi di Jawa Timur pada bulan April antara lain: Daging Ayam Ras 0,06% (m to m), Emas Perhiasan 0,02% (m to m), Ayam Hidup 0,02% (m to m), pada bulan Mei antara lain: Emas Perhiasan 0,04% (m to m), Ayam Hidup 0,03% (m to m), Daging Sapi 0,02% (m to m), dan pada bulan Juni antara lain: Telur Ayam Ras 0,02% (m to m), Emas Perhiasan 0,02% (m to m), Beras 0,01% (m to m). Pada Triwulan II 2021, fokus kinerja pengendalian inflasi Jawa Timur pada potensi kenaikan permintaan musiman pada bahan makanan di momen HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H, selain itu potensi peningkatan tekanan inflasi disebabkan oleh mulai pulihnya kinerja perekonomian pada kuartal kedua sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan sekunder (sandang, perawatan diri dan kebutuhan lainnya). Terjaganya stok bahan pangan strategis menjadi penahan tekanan inflasi yang lebih tinggi pada Triwulan II 2021. Meskipun panen raya padi telah berakhir pada April 2021, penatausahaan stok pangan komoditas strategis Jawa Timur yang baik mampu menahan potensi peningkatan inflasi kelompok bahan makanan menjadi lebih tinggi. Penyelenggaraan Pasar Murah secara rutin pada momen HBKN Ramadhan dan Idul Fitri oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas arahan Ibu Gubernur Jawa Timur turut menahan inflasi pada Triwulan II 2021. Di samping terjaganya ketersediaan stok bahan pangan dan penyelenggaraan pasar murah, potensi penurunan inflasi juga diperkirakan terjadi pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya. Pada periode April - Juni 2021, Pemerintah tetap memberikan stimulus keringanan berupa diskon tarif tenaga listrik bagi rumah tangga dan pelaku usaha. Diskon tarif tenaga listrik sebesar 50% diberlakukan untuk golongan rumah tangga daya 450 VA (R1/TR 450 VA), golongan bisnis kecil daya 450 VA (B1/TR 450 VA), dan golongan industri kecil daya 450 VA (I1/TR 450 VA). Diskon tarif tenaga listrik sebesar 25% untuk golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi (R1/TR 900 VA). Pembebasan biaya beban atau abonemen sebesar 50% untuk golongan sosial daya 220 VA, 450

VA dan 900 VA, golongan bisnis dan industri daya 900 VA. Secara spasial kabupaten/kota di Jawa Timur, pada Triwulan II 2021, di seluruh wilayah mengalami inflasi, dengan pemetaan komoditas Emas dan Perhiasan menjadi penyumbang utama, diikuti oleh komoditas Daging Ayam Ras. Kenaikan harga tersebut didorong adanya kecenderungan meningkatnya pembelian emas menjelang Hari Raya, yang akhirnya mempengaruhi harga jual emas. Sedangkan tingginya kebutuhan komoditas daging ayam ras sebagai bahan makanan utama masyarakat khususnya sebagai pilihan lauk-pauk primadona.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi TPID Provinsi di Jawa Timur pada Triwulan II 2021 masih tetap terfokus pada strategi roadmap 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif). Untuk mencapai sasaran inflasi $3\pm 1\%$ di akhir tahun 2021, pada Triwulan II 2021 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mengacu strategi 4K untuk pengendalian inflasi yang mencakup diantaranya: a. Ketersediaan Pasokan, 1) Ibu Gubernur Jawa Timur Meninjau Langsung Serta Memastikan Ketersediaan Stok Bahan Pokok Mejelang Bulan Ramadhan 1442 H, bertempat di Pasar Sidoharjo-Kab Lamongan, pada hari Minggu 4 April 2021; 2) Ibu Gubernur Jawa Timur Mengunjungi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada Sentra Produksi Padi di Kab Ngawi untuk melakukan serap aspirasi dan rencana fasilitasi peningkatan mutu produksi padi petani, pada hari Senin 5 April 2021; 3) Ibu Gubernur Jawa Timur Menghadiri panen raya padi varietas unggul Kreasi Insan Petani (KIP), yang rerata dalam 1 Ha mampu menghasilkan 12-16 ton gabah kering giling (GKG) di Kec Sambit, Kab Ponorogo, pada hari Selasa 6 April 2021; 4) Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur bersama Menteri Perdagangan dan Walikota Surabaya melakukan sidak dan pengecekan harga kebutuhan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1422 H, di pasar Wonokromo Surabaya, pada hari Selasa 20 April 2021;. 5) Dalam kunjungan Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo dan Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, Ibu Gubernur Jawa Timur mendampingi langsung peninjaun sentra produksi padi di Kab Malang, pada hari Kamis 29 April 2021; 6) Ibu Gubernur Jawa Timur, bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) melakukan gerakan panen porang di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, pada hari Jum'at 18 Juni 2021; 7) Ibu Gubernur Jawa Timur, bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Deputi Menko Perekonomian, Bupati Gresik dan Bupati Sidoarjo melaksanakan rapat finalisasi operasionalisasi SPAM Umbulan melalui skema KPBU (PPP), pada hari Senin 21 Juni 2021; b. Keterjangkauan Harga 1) Ibu Gubernur Jawa Timur dan Gubernur DKI Jakarta, menyaksikan secara langsung kerjasama antara Gapoktan Kab Ngawi dan PT. Food Station Tjipinang Jaya Jakarta dalam penyerapan beras hasil produksi petani untuk memenuhi kebutuhan pangan ibukota, Minggu 25 April 2021; 2) Ibu Gubernur Jawa Timur memberikan arahan dan memerintahkan pelaksanaan Pasar Murah Ramadhan dan Pasar Murah Online (PAMOR), menjelang HBKN Idul Fitri 1422 H kepada jajaran OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas harga serta dalam rangka percepatan JATIM BANGKIT, pada periode tanggal 6 s.d 7 Mei 2021; 3) Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur beserta Bapak Bupati Gresik meghadiri lelang bandeng di festival ikan gresik 2021, melalui acara ini potensi bandeng di Gresik dijadikan bagian dari pemulihan ekonomi, Minggu 9 Mei 2021; 4) Ibu Gubernur Jawa Timur bersama MUI Jatim melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman terkait pemberdayaan ekonomi dan pengembangan halal value chain serta sentra produk halal Indonesia di Kab Situbondo, pada hari Rabu 26 Mei 2021; 5) Ibu Gubernur Jawa Timur Melaksanakan Kegiatan Silaturahmi Program OPOP dengan 220 perwakilan pondok pesantren dari empat Kabupaten Eks - Karisidenan Bojonegoro untuk mendorong seluruh pesantren agar bisa saling berkolaborasi

dan saling menguatkan untuk ekonomi santri dan pesantren bisa terus tumbuh dan lebih bermanfaat bagi masyarakat, pada hari Rabu 9 Juni 2021; c. Kelancaran Distribusi 1) Ibu Gubernur Jawa Timur memimpin langsung Misi Dagang antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Maluku Utara dengan tujuan untuk kerjasama saling menguntungkan bagi kedua wilayah dalam percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Kamis 8 April 2021; 2) Ibu Gubernur Jawa Timur beserta Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim, meninjau langsung penanganan dampak gempa bumi dan memastikan percepatan penanganan serta perbaikan infrastruktur yang rusak di Kec Pronojiwo, Kab Lumajang, pada hari Minggu 11 April 2021; 3) Ibu Gubernur Jawa Timur secara pribadi meninjau langsung penanganan dampak gempa bumi dan memastikan percepatan penanganan serta perbaikan infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak di wilayah Kab Malang, Kab Blitar dan Kota Blitar, pada hari Rabu 14 April 2021; 4) Ibu Gubernur Jawa Timur memimpin langsung Misi Dagang antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan untuk membangun sebuah sinergitas dan penguatan kapasitas para pelaku usaha kedua daerah, Jum'at 30 April 2021; 5) Ibu Gubernur Jawa Timur secara pribadi meninjau langsung penanganan dampak gempa bumi susulan dan memastikan percepatan penanganan serta perbaikan infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak di wilayah Kab Blitar, pada hari Sabtu 22 Mei 2021; 6) Ibu Gubernur Jawa Timur, melakukan kunjungan kerja yaitu peninjauan di UPT Dishub (Dinas Perhubungan) Jawa Jatim terkait perkembangan pelabuhan Pengumpuan Paciran untuk mendorong peningkatan jumlah logistik atau kargo yang dikelola, pada hari minggu 23 Mei 2021; 7) Ibu Gubernur Jawa Timur melepas ekspor pintu kayu dalam rangka mendorong kinerja ekspor provinsi oleh PT. Woodone Integra Indonesia bersama Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, di Kab Sidoarjo, pada hari Selasa, 25 Mei 2021; 8) Ibu Gubernur Jawa Timur mengunjungi sentra produksi sarang burung wallet yang merupakan salah satu komoditas ekspor andalan Jawa Timur di Kab Bojonegoro, pada hari Senin, 7 Juni 2021; 9) Bapak Wakil Gubernur Jatim bersama Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) menghadiri pelepasan ekspor PT Sun Paper Source (SPS) di Kabupaten Mojokerto, dengan produk kertas tisu ke sejumlah negara seperti Malaysia, Amerika Serikat, Australia dan Jamaica dengan jumlah mencapai 136,3 ton yang dikemas dalam 11 kontainer berisi parent roll dan finished good. Kegiatan ini diharapkan dapat terus memacu ekspor Jawa Timur untuk terus tumbuh positif, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021; 10) Bapak Wakil Gubernur Jatim bersama Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) dan Wakil Bupati Lamongan meninjau gudang untuk penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) di Kabupaten Lamongan. ada potensi bagi petani untuk bisa memanfaatkan SRG dalam menunda penjualan di saat panen raya dan menunggu harga yang lebih baik di kemudian hari, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021. d. Komunikasi Efektif 1) Pelaksanaan kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID Provinsi Jawa Timur, pada hari Selasa 27 April 2021, dengan tema "Meneguhkan Jawa Timur Sebagai Lumbung Pangan Nusantara Melalui Kerjasama Antar Daerah Untuk Mendukung Kestabilan Harga Pada Ramadhan dan Idul Fitri 2021". Pada kegiatan yang langsung dipimpin oleh Ibu Gubernur Jawa Timur tersebut dilaksanakan beberapa kegiatan seremonial, antara lain: a. Pelepasan pengiriman komoditas strategis ayam karkas dari Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Maluku Utara oleh PT. Jatim Graha Utama/ PT. JGU (BUMD JATIM) seberat 15,5 ton atau setara 1 kontainer 20 feet kepada PT. ARTA TANI MINA (ATM); b. Menyaksikan penandatanganan business to business transaksi komoditas strategis antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Kalimantan Utara; c. Agenda HLM dan Rakorwil TPID-P Jawa Timur juga dilaksanakan serentak dengan HLM TPID-P Maluku Utara dan Kalimantan Utara secara daring/ online. 2) Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, memimpin rapat evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dengan tujuan agar masyarakat lebih disiplin pada penerapan Prorokol Kesehatan dan penanganan

pengendalian pademi Covid-19, pada hari Jumat 21 Mei 2021; 3) Ibu Gubernur Jawa Timur, beserta Menteri Kesehatan (Menkes) Bapak Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BNPB Bapak Letnan Jendral Ganip Warsito, menghadiri rapat koordinasi percepatan penanganan lonjakan kasus Covid-19 yang selama beberapa pekan terakhir terjadi di Kabupaten Bangkalan, pada hari Selasa, 8 Juni 2021; 4) Ibu Gubernur Jawa Timur, beserta Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB memantau secara langsung program percepatan vaksinasi Covid-19 di Kab Kediri, pada hari Kamis 10 Juni 2021; 5) Ibu Gubernur Jawa Timur, beserta Pangdan V Brawijaya, dan Kapolda Jatim memantau secara langsung program percepatan vaksinasi Covid-19 di Kab Sumenep, pada hari Sabtu 12 Juni 2021; 6) Ibu Gubernur Jawa Timur, beserta Pangdan V Brawijaya, dan Kapolda Jatim memantau secara langsung program percepatan vaksinasi Covid-19 di Kab Sampang, pada hari Rabu 16 Juni 2021; 7) Ibu Gubernur Jawa Timur, beserta Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB memantau secara langsung program percepatan vaksinasi Covid-19 dan penguatan PPKM Mikro di Kota dan Kab Madiun, pada hari Jum'at 17 Juni 2021.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh TPID Provinsi Jawa Timur pada periode Triwulan II 2021 telah berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut tercermin dari terjaganya tingkat inflasi di Jawa Timur yang berada pada level yang rendah dan stabil sebesar 1,19 % (y on y), dan berada dibawah inflasi Nasional yang sebesar 1,33% (y on y). Tantangan pengendalian inflasi pada Triwulan II 2021 lebih kepada pengendalian harga yang bersumber pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau, pada sub kelompok makanan seperti utamanya Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Cabai Merah, Daging Sapi, karena pengaruh tingginya permintaan saat HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1442H. Dalam menghadapi sejumlah masalah pengendalian harga komoditas TPID Provinsi Jawa Timur memperkuat strategi 4 K melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID-P, rapat teknis dan rapat koordinasi, aktivitas pengendalian harga di lapangan seperti sidak, kunjungan lapangan, dan pemantauan harga, serta pengoptimalan teknologi informasi melalui aplikasi <https://jaimreport.jatimprov.go.id/>, www.siskaperbapo.com, dan www.poskodigitalatgaspangan.net dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran dan tepat waktu. Pada Triwulan II 2021 komoditas volatile food tetap menjadi penyumbang utama inflasi karena tingginya permintaan masyarakat dan ketersediaan pasokan yang terbatas (Jawa Timur merupakan penyumbang kebutuhan komoditas pangan bagi DKI Jakarta dan Kawasan Indonesia Timur). Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Jawa Timur dalam pengendalian inflasi khususnya pada komoditas volatile food. Oleh karena itu kunci utama pengendalian inflasi di Jawa Timur adalah dengan melakukan kontrol terhadap lalu-lintas perdagangan antar daerah terhadap komoditas strategis dengan terus memperkuat sistem logistik daerah (SISLOGDA) yang terintegrasi dalam kerangka implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang saling menguntungkan untuk menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif sehingga akan tercapai keterjangkauan harga pada berbagai komoditas stragegis yang stabil. Selain itu, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat melalui PPKM Mikro dan diteruskan dengan kebijakan PPKM Darurat akan ikut mengkoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada proyeksi laju inflasi (menuju ke pelemahan), secara teori inflasi cenderung mengikuti arah dari pergerakan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi tumbuh maka besar kemungkinan inflasi juga akan mengalami peningkatan. Aktifitas perekonomian juga akan mendorong permintaan barang dan jasa dari masyarakat, dengan kondisi dorongan ini, maka potensi pergerakan harga untuk naik akan terjadi. Kondisi pembatasan mobilitas yang disertai

aktifitas perekonomian akan berpotensi pada berkurangnya pendapatan masyarakat dalam masa pembatasan ini menjadi lebih besar, jika pendapatan masyarakat berkurang, maka potensi daya beli juga akan ikut berkurang. Akibatnya jika daya beli berkurang maka permintaan barang dan jasa juga akan ikut berkurang, sehingga akan menekan laju inflasi (berubah menjadi deflasi).

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan isu utama masalah keseimbangan supply-demand pada kelompok volatile food. Penurunan permintaan akibat pembatasan kegiatan masyarakat namun produksi on farm yang tetap perlu mendapatkan perhatian lebih, hal tersebut mengingat Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional, maka motivasi produksi petani dan UMKM Jawa Timur harus tetap terjaga di tengah penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, perlu disusun strategi jangka panjang untuk menyeimbangkan neraca supply-demand komoditas strategis khususnya dari sisi on-farm meliputi manajemen masa tanam yang tepat dan terarah mengantisipasi pengaruh musiman pada komoditas tersebut, penggunaan teknologi pertanian/pupuk/irigasi yang tepat dan optimal yang dapat menghasilkan produktivitas yang maksimal untuk kontinuitas hasil produksi, memberikan dukungan dan stabilisasi harga pakan ternak bagi peternak rakyat melalui pelaksanaan fungsi intermediary supply-demand komoditas strategis oleh BUMD Jatim. Sedangkan untuk isu terkait pembatasan mobilitas dan aktifitas masyarakat untuk menekan laju Pandemi Covid-19, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2021 diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi yang mendukung proses pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19. Secara spesifik, sebagaimana kesepakatan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) awal tahun 2021, langkah strategis yang ditujukan untuk menjaga inflasi dalam kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada tahun 2021 mencakup: 1. Menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0% - 5,0%. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat empat pilar strategi (4K) di masa pandemi Covid-19 dengan strategi yang difokuskan untuk menjaga kesinambungan pasokan sepanjang waktu dan kelancaran distribusi antar daerah antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerjasama antar daerah; 2. Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021 dengan tema "Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan"; 3. Memperkuat sinergi antar Kementerian/Lembaga dengan dukungan pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan program TPIP 2021; 4. Memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi antara lain melalui program food estate serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam; dan 5. Menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Serta memantapkannya dengan menjalankan strategi yang telah disusun oleh TPID-P Jawa Timur, antara lain: 1. Mencegah dan mengurangi disparitas harga antar wilayah produsen dan konsumen yang terjadi di Jawa Timur melalui penguatan integrasi sistem logistik daerah menggabungkan rantai hulu hingga hilir dengan dukungan konektivitas infrastruktur pendukung kelancaran hambatan distribusi produksi hasil pertanian yang menjadi bahan baku utama dari produk olahan makanan; 2. Konektivitas antar daerah dalam jangka panjang perlu menjadi upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjembatani dan memfasilitasi proses distribusi barang dari produsen ke konsumen sehingga Pemerintah/ TPID

Provinsi ikut andil dan berperan aktif dalam proses pembentukan harga sebagai stabilisator guna meminimalkan fluktuasi/volatilitas harga komoditas bahan pokok makanan strategis; 3. Melaksanakan keberlanjutan Pusat Distribusi Provinsi (dimotori oleh Lumbung Pangan Jatim) yang terintegrasi dengan sistem informasi (IT) bisa menjadi alat utama yang efektif mengatasi kelangkaan pasokan, tingginya disparitas harga dan besarnya fluktuasi harga komoditas bahan pokok makanan. Keunggulan Pusat Distribusi Provinsi (dimotori oleh Lumbung Pangan Jatim) yang mengusung konsep Intermediatory Supply Demand komoditas strategis sebagai konsep utamanya. Dengan adanya konsep Intermediatory Supply Demand ditunjang penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, diharapkan dapat melakukan fungsi safety/ pengamanan posisi stock barang-barang secara akurat dan real-time. Database tersebut dapat dikembangkan menjadi analisis supply dan demand forecasting, sehingga dapat mendorong terjadinya kerjasama antar daerah dan memberikan solusi meminimalkan kelangkaan atau kelebihan stock, yang berimplikasi pada terkendalinya fluktuasi harga; 4. Perlunya strategi komunikasi yang efektif (baik disisi High Level, maupun sinergi jajaran teknis di OPD anggota TPID-P) untuk menurunkan tekanan inflasi yang bersumber dari inflasi inti dan administered price, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dampak kenaikan kelompok barang yang berasal dari eksternal dan tidak dapat dikontrol melalui kebijakan domestik.